



ნანუნ სათ კერტი ლოკა ბალი
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju **BALI ERA BARU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUUN 2021



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI**



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami Panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan.

Laporan ini disusun dengan tujuan mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan Pemerintah Provinsi Bali yang akuntabel.

Denpasar, 05 JANUARI 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I Wayan Mardiana
NIP. 19620317 199003 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok & Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	5
1.6 Sarana dan Prasarana	5
BAB II Perencanaan Kinerja	7
2.1 Tujuan dan Sasaran	7
2.2 Strategi dan Kebijakan	9
2.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	10
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2021	15
2.5 Indikator Kinerja Utama 2021	16
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2021	17
2,7 Instrumen Pendukung	18
BAB III Akuntabilitas Kinerja	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.2 Realisasi Anggaran	31
BAB IV Penutup	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Langkah-langkah ke depan	41
Lampiran – Lampiran	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali ke depan yaitu :

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola yang menyebabkan Koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya;
2. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM sebagai akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Bali yang masih beranggapan lebih baik mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan;
3. Kurangnya Koperasi dan UKM yang mendapat akses permodalan yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan usaha;
4. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM sehingga peluang pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan koperasi dan UKM jalan ditempat.

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang telah disusun dalam LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2020, kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali termasuk kategori sangat baik



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "good governance" (kepemerintahan yang baik). Agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum dan Kebijakan

1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
2. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pedoman Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Bali No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2018-2023.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

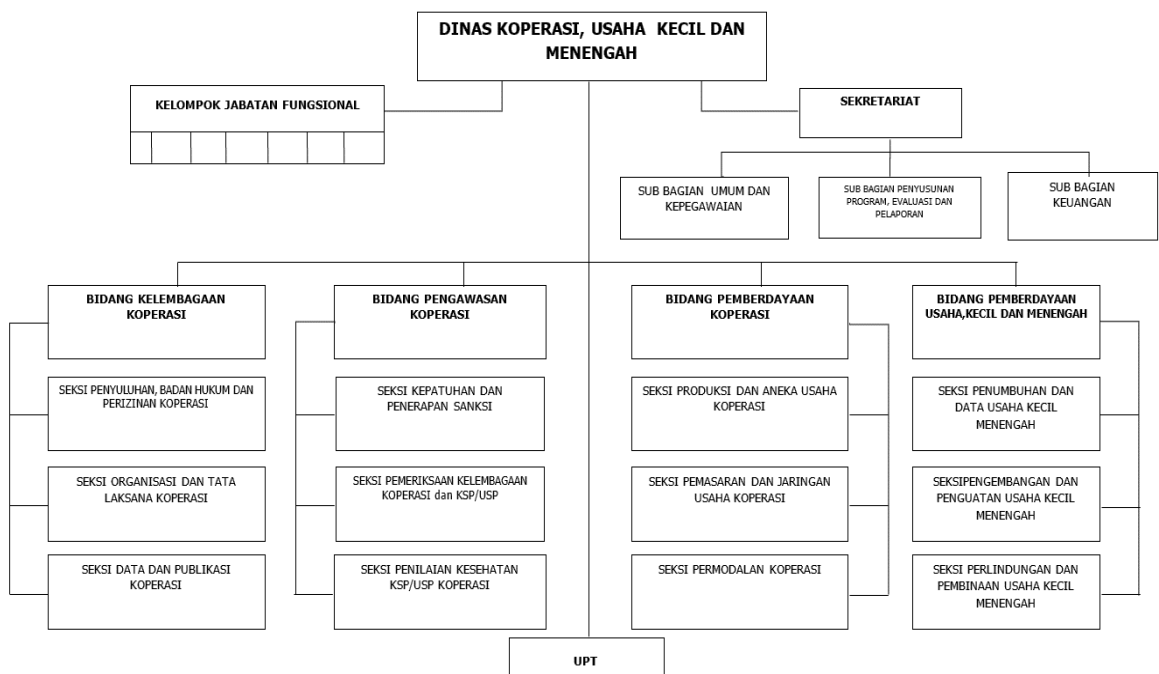
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu :

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi.
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Bali No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, adapun susunannya terdiri dari :

- 1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 2) Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi:
 - a. Seksi Penyuluhan, Badan Hukum dan Perijinan Koperasi
 - b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana
 - c. Seksi Data dan Publikasi Koperasi
- 3) Bidang Pengawasan Koperasi, membawahi :
 - a. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi

- b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan Koperasi simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam
 - c. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi
- 4) Bidang Pemberdayaan Koperasi , membawahi :
- a. Seksi Produksi dan Aneka Usaha Koperasi
 - b. Seksi Permodalan Koperasi
 - c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi
- 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) , membawahi :
- a. Seksi Penumbuhan dan Data Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Menengah
 - c. Seksi Perlindungan dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah
- 6) Dan UPT Diklat Koperasi yang membawahi :
- a . Sub. Bagian Tata Usaha UPT Diklat Koperasi
 - b. Seksi Penyusunan Program Monev UPT Diklat Koperasi
 - c. Seksi Penyelenggaraan Diklat

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjalankan kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM pada tataran menengah mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses Koperasi dan UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar . Sementara itu kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM pada tataran makro mencakup peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran.

Ketahanan ekonomi sangat ditentukan oleh kekokohan dan kemandirian sektor Koperasi, dan UMKM. Untuk itu upaya pemberdayaan dan pengembangan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali harus terus dilaksanakan melalui pembangunan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha Koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha, kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM, untuk menjadikan Koperasi dan UMKM mampu menjadi Soko Guru Perekonomian Daerah, penggerak

perjuangan Ekonomi Rakyat, dan menjadi sarana untuk mengatasi masalah-masalah pokok pembangunan, khususnya mengatasi masalah pengangguran, dan kemiskinan serta menjadi ketahanan ekonomi daerah.

1.5 Sumber Daya Manusia

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	18
2	Sarjana (S1)	43
3	Diploma (D3)	2
4	SLTA	9
5	SLTP	-
6	SD	1
	Jumlah	73

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. SDM memegang peranan yang sangat penting bagi kesuksesan suatu

organisasi. Berikut ini jumlah pegawai, pangkat dan golongan , jumlah pejabat struktural dan fungsional per Tahun 2021 sebagai berikut :

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat

No	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Golongan IV	17
2	Golongan III	49
3	Golongan II	7
4	Golongan I	-
	Jumlah	73

No	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
Jabatan Struktural		
1	Golongan IV	17
2	Golongan III	49
3	Golongan II	7
Jabatan Fungsional		
1	Arsipari	1
2	Pejabat Pengadaan	1
3	Calon Pengawas Koperasi	5
	Jumlah	73

1.6 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Bali perlu adanya dukungan prasarana dan sarana yang memadai, gedung yang ditempati Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai gedung perkantoran merupakan bangunan gedung yang sudah sangat tua dan lama yaitu gedung sejak berstatus Kantor Wilayah Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum pernah sama sekali direnovasi kondisinya belum memadai terutama ruang kerja dan ruangan rapat.



NO	GOLONGAN	TOTAL		KETERANGAN
		JUMLAH	SATUAN	
1	Tanah	10.665	M ²	Kondisi Baik
2	Bangunan Gedung	6	Unit	Kondisi Baik
3	Kendaraan Operasional Roda 4	10	Unit	Kondisi Baik
4	Kendaraan Operasional Roda 2	14	Unit	Kondisi Baik
5	Meja Kerja	231	Unit	Kondisi Baik
6	Kursi Kerja	229	Unit	Kondisi Baik
7	Komputer	31	Unit	Kondisi Baik
8	Printer	24	Unit	Kondisi Baik
9	Filling Cabinet	29	Unit	Kondisi Baik
10	Rak Kaca/Kayu	23	Unit	Kondisi Baik
11	Lemari Besi/Kayu	24	Unit	Kondisi Baik
12	AC	62	Unit	Kondisi Baik
13	Zice	9	Unit	Kondisi Baik
14	Kursi Tamu	12	Unit	Kondisi Baik
15	Alat Kantor Lainnya	3	Unit	Kondisi Baik



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu : **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"** melalui **Pola Pembangunan Semesta Berencana**, dimana dalam **Membangun Era Baru: Kondisi Bali Dengan Tatahan Kehidupan Baru Yang Holistik Mencakup Tiga Dimensi**, Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mendukung misi yang ke 17 yaitu **"Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali"**. Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali juga tidak terlepas dari visi, misi Pemerintah Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

TUJUAN

Meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah

SASARAN



Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel



Meningkatnya Ketangguhan dan Kemandirian Wirausaha dari Pelaku UMKM

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR
1	2	3
Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	1. Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase koperasi yang aktif
		Persentase peningkatan produktivitas koperasi
		Jumlah Koperasi yang Bankable
	2. Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah UMKM yang Bankable
		Jumlah Peningkatan Kelas Usaha UMKM
		Jumlah Penumbuhan Wirausaha Baru

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		TARGET KINERJA PADA TAHUN				
	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3					
Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	-	5,70%	6,27%	6,85%	7,50%
		Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	-	-	50 KUMKM	-	-
	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	-	7,71%	8,38%	9,56%	9,57%

Catatan : Indikator Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi untuk tahun 2022-2023 akan dihapus dikarenakan indikator bersifat mikro dan lebih cocok menjadi indikator program dibandingkan untuk menjadi indikator sasaran Dinas

2.2 Strategi dan Kebijakan



Peningkatan Kualitas SDM



Peningkatan Akses Pembiayaan



Penguatan Kelembagaan Usaha Melalui Modernisasi Usaha



Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran



Mendorong pembentukan koperasi produksi serta UMKM berbasis produk ramah lingkungan

2.3 Program Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021

Tabel 2.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang bankable	Jumlah	64	Rp. 210.094.650
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha	Jumlah	64	Rp. 201.362.650
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	Jumlah	10	Rp. 201.362.650
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	Jumlah	5	Rp. 8.732.000
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	Jumlah	1	Rp. 8.732.000
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	Jumlah	130	Rp. 130.404.106

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel	Jumlah	85	Rp. 113.392.496
Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntabel	Jumlah	30	Rp. 58.682.148
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian	Jumlah	55	Rp. 54.710.348
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP koperasi yang akuntabel	Jumlah	45	Rp. 17.011.610
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP yang akuntabel	Jumlah	35	Rp. 17.011.610
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi	Jumlah	130	Rp. 60.074.198
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	Jumlah	130	Rp. 60.074.198

Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	Jumlah	30	Rp. 48.000.248
Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi nivo Provinsi yang Sehat	Jumlah	100	Rp. 12.073.950
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Jumlah	126	Rp. 312.664.305
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	Jumlah	126	Rp. 312.664.305
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Stndarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Jumlah	10	Rp. 157.009.339
	Jumlah Koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	Jumlah	10	
	Jumlah koperasi yang mengikuti kemitaaan	Jumlah	10	
	Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	Jumlah	3	
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	Jumlah	15	Rp. 155.654.966

	Jumlah koperasi nivo Provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	Jumlah	64	
	Jumlah Koperasi tenun yang aktif	Jumlah	1	
	Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan	Jumlah	30	
	Jumlah subak sebagai koperasi tani	Jumlah	1	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	Jumlah	50	Rp. 3.706.960.106
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	Jumlah	50	Rp. 3.706.960.106
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikasi kompeten	Jumlah	990	Rp. 3.706.960.106
Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Bankable	Jumlah	185	Rp. 450. 154.890
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	Jumlah	185	Rp. 450. 154.890

Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	Jumlah	50	Rp. 450. 154.890
	Jumlah UMKM yang melakukan kerjasama/kesepakatan	Jumlah	4	
	Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha	Jumlah	50	
	Jumlah UMKM yang Meningkatkan usahanya	Jumlah	32	

2.4 Perjajian Kinerja tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2023, Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan anggaran atau DPA. Penetapan/Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2021:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1 Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1 Persentase peningkatan produktivitas koperasi	6,27%
	2 Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	50 KUMKM
2 Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	1 Rasio Kewirausahaan	8,38%

Tabel Lanjutan 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 243.089.450	Sesuai dengan anggaran Induk
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 209.952.106	Sesuai dengan anggaran Induk
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 127.476.198	Sesuai dengan anggaran Induk
4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 583.089.605	Sesuai dengan anggaran Induk
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 601.178.890	Sesuai dengan anggaran Induk
7	Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Rp. 3.392.755.626	+ (DAK)

8	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 16.047.323.164	Pendukung
	TOTAL	Rp. 21.204.865.039	

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM)	1 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	$\frac{\sum \text{Nilai Tambah KUMKM per sektor}}{\text{Total PDRB Bali}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan Stakeholder Terkait	Bappeda dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali	
a	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	1 Persentase peningkatan produktivitas koperasi	$\frac{\text{Total SHU Koperasi}}{\text{Modal Koperasi}} \times 100\%$	Bidang Kelembagaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pengawasan	Bidang Kelembagaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi	
		2 Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikat	Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikat merupakan jumlah pengelola KUMKM yang diberikan diklat dan mendapat sertifikasi	Bidang UPTD Koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan	
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	1 Rasio kewirausahaan	$\frac{\text{Jumlah UMKM di Bali}}{\text{Jumlah Penduduk di Bali}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan UKM	Bidang Pemberdayaan UKM dan Lembaga Keuangan	

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 21.204.865.039. Dengan rincian : Belanja Pegawai Rp. 12.605.919.352 dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.598.945.687.

Tabel 2.3 Target belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2021
Sebelum dan Sesudah Perubahan anggaran

NO	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
		TOTAL (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Alokasi anggaran Tahun 2021	21.204.865.039,29	19.433.324.601,00
2	Belanja Barang dan Jasa	8.598.945.687,00	7.905.918.567,00
3	Belanja Pegawai	12.605.919.352,00	11.527.406.034,00

Tabel 2.4 Target belanja Program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali
Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Perubahan anggaran

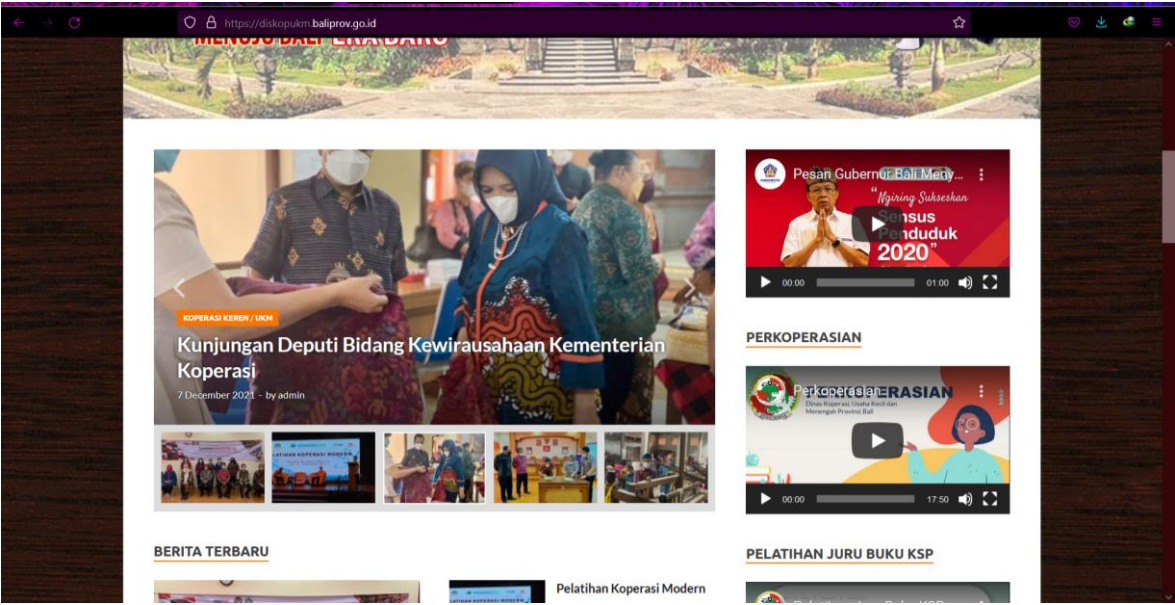
No	Program	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1	Pelayan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 243.089.450	Rp.210.094..650
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 209.952.106	Rp. 130.404.106
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 127.476.198	Rp. 60.074.198
4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 583.089.605	Rp. 312.664.305
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 601.178.890	Rp. 450.154.890
7	Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Rp. 3.392.755.626	Rp. 3.706.960.106
8	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 16.047.323.164	Rp. 14.704.453.346
	TOTAL	Rp. 21.204.865.039	Rp. 19.574.805.601

2.7 Instrumen Pendukung

1. Website Dinas

Instrument pendukung sistem informasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada tahun 2021 telah dilengkapi dengan adanya Website Dinas. Dengan adanya Website tersebut diharapkan dapat menjadi media penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat umumnya dan masyarakat Koperasi dan UMKM pada khususnya

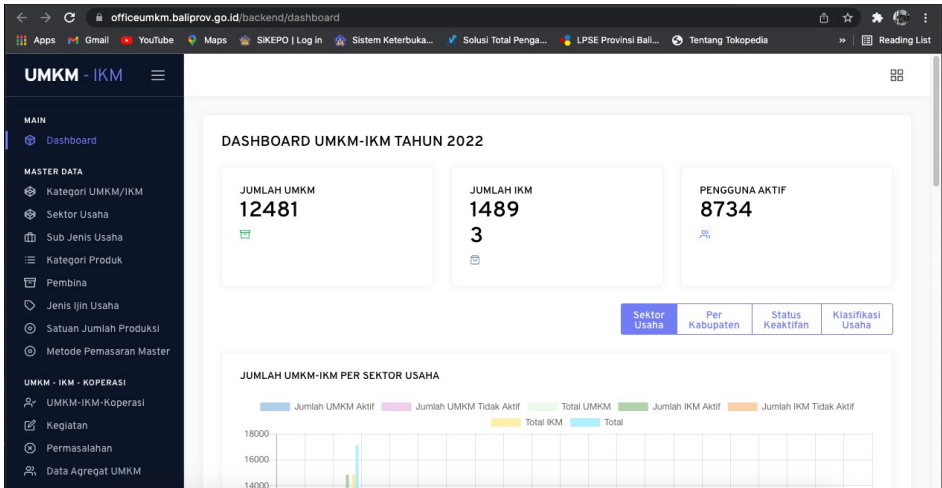
dapat mengetahui Keberadaan dan Tugas Fungsi Dinas dalam Pengembangan Sektor Koperasi dan UMKM, serta dapat mengetahui program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan Dinas.



Gambar tampilan website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

2. Online Data UMKM dan IKM

Untuk mendukung penerapan SAKIP Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan Online Data UMKM. Online Data UMKM dan IKM merupakan Aplikasi yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang berkerja sama dengan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Bali. Online Data UMKM dan IKM adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data UMKM. Aplikasi ODS juga mengelola proses Sistem pendataan yang dilakukan adalah mengkompilasi data UMKM yang diperoleh dari kabupaten/kota.



Gambar Tampilan Online Data UMKM dan IKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah Provinsi Bali



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good Governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

3.1.1 Target dan realisasi kinerja

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Berjalan			Kriteria	Kode
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1 Persentase peningkatan produktivitas koperasi	%	6,27%	9,17%	146%	Sangat Baik	
	2 Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	KUMKM	50	117	234%	Sangat Baik	
2 Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	1 Rasio Kewirausahaan	%	8,38%	9,55%	113%	Sangat Baik	

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis bertujuan untuk mengeksplorasi data yang diperoleh dan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai

dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra;

Selanjutnya hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan dapat memunculkan rekomendasi atau solusi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisi Pencapaian Sasaran
Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2023	Capaian 2021 terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1. Persentase peningkatan produktivitas	8,35%	6,27%	9,17%	146%	7,50%	122%
		2. Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	-	50	117	234%	-	-

Catatan : Indikator Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi untuk tahun 2022-2023 akan diganti dikarenakan indikator bersifat mikro dan lebih cocok menjadi indikator program dibandingkan untuk menjadi indikator sasaran Dinas

Realisasi indikator sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2021 **“Persentase peningkatan produktivitas koperasi berbasis produk lokal”** adalah 7,68% dari target sebesar 6,27% dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 122%. Peningkatan produktivitas koperasi adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. capaian ini bisa diwujudkan dengan melakukan aktivitas melaksanakan temu konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank, sosialisasi dan pemanfaatan KUR dan skim-skim kredit lainnya.

$$\frac{\text{Total SHU Koperasi}}{\text{Modal Koperasi}} \times 100\%$$

Formula perhitungan produktifitas Koperasi

Tabel 3.6
Analisi Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi
Sasaran Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
				Target	Realisasi	%		
1	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1. Persentase peningkatan produktivitas	8,35%	6,27%	7,68%	122%	Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam upaya mencapai pencapaian target : 1. Fasilitasi Koperasi untuk Mengakses LPDB 2. Rekomendasi Koperasi sebagai pelaksana Kredit Ultra Mikro (UMI)	Untuk lebih meningkatkan produktifitas koperasi, perlu difokuskan untuk mensejahterakan anggota koperasinya, yang dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan anggota koperasi yang bergerak di sektor UMKM maupun industri
		2. Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	-	50	117	234%	Dengan dukungan dana DAK Kegiatan pelatihan-pelatihan maupun bimtek dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberi manfaat lebih ke masyarakat maupun pengurus atau pengelola Koperasi	Dengan dukungan dana DAK yang besar, pelatihan maupun bimtek dapat dilaksanakan lebih berfariatif sesuai kebutuhan masyarakat saat ini

Tabel 3.7
Analisi Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sasaran Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	7,68%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang bankable	64	Menunjang
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin usaha	64	Menunjang
			Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	10	Menunjang
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	5	Menunjang
			Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	1	Menunjang
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	45	Menunjang

			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel	28	Menunjang
			Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntabel	7	Menunjang
			Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian	21	Menunjang
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP koperasi yang akuntabel	17	Menunjang
			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP yang akuntabel	17	Menunjang
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi	63	Menunjang
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	63	Menunjang
			Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	11	Menunjang

			Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi nivo Provinsi yang Sehat	52	Menunjang
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	126	Menunjang
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	33	Menunjang
			Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	10	Menunjang
				Jumlah Koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	10	Menunjang
				Jumlah koperasi yang mengikuti kemitaaan	10	Menunjang
				Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	3	Menunjang
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	15	Menunjang
				Jumlah koperasi nivo Provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	64	Menunjang
				Jumlah Koperasi tenun yang aktif	1	Menunjang

				Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan	94	Menunjang
				Jumlah subak sebagai koperasi tani	1	Menunjang
	Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikat	117	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	117	Menunjang
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	990	Menunjang
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikasi kompeten	873	Menunjang

Tabel 3.8
Analisi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2023	Capaian 2021 terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	7,71%	8,38%	9,55%	113	9,57	99,79

Tabel 3.9
Analisi Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi
Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2021			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan Mengkases program kementerian	7,71%	8,38%	9,55%	113	Faktor pendukung dalam pencapaian target adalah : 1. Akibat dampak pandemi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kemudian beralih menjadi wirausaha baru 2. Pelatihan maupun pendampingan memanfaatkan Kerjasama dengan pihak pemerintah pusat maupun Stakeholder, seperti Kemenkop maupun Gojek	Penumbuhan UMKM dilaksanakan dengan upaya memfasilitasi dan menjalin kerjasama dengan gojek atau dengan start-up lainnya dan berupaya memfasilitasi Mengkases program kementerian, Mendorong UMKM melakukan ekspansi melakukan penjualan melalui Online melalui marketplace

Tabel 3.10
Analisi Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
Meningkatnya Ketangguhan dan Kemandirian Wirausaha dari Pelaku UMKM	Rasio Kewirausahaan	9,55%	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Bankable	1.744	Menunjang
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	425	Menunjang
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	325	Menunjang
				Jumlah UMKM yang melakukan kerjasama/kesepakatan	11	Menunjang
				Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha	558	Menunjang
				Jumlah UMKM yang Meningkatkan usahanya	425	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali DPPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 12.855.952.250,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.725.071.149,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,20%. Dalam melakukan analisis efisiensi anggaran untuk setiap sasaran, untuk Bagian yang disajikan dalam tabel 3.8 ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk setiap sasaran.

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat tinggi ataupun sangat tinggi, kondisi ini sejalan dengan prinsip pemerintah yang baik. Rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang bankable	Rp. 210.094.650	Rp 2.209.808.840	99,86
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin usaha	Rp. 201.362.650	Rp 2.209.808.840	99,89
a	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	Rp. 201.362.650	Rp 2.209.808.840	99,89
2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	Rp. 8.732.000	Rp 8.665.000	99,23
a	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	Rp. 8.732.000	Rp 8.665.000	99,23

B	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	Rp. 130.404.106	Rp 115.346.945	88,45
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel	Rp. 113.392.496	Rp 104.667.895	92,31
a	Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntabel	Rp. 58.682.148	Rp 50.215.348	85,57
b	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian	Rp. 54.710.348	Rp 54.452.547	99,53
2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP koperasi yang akuntabel	Rp. 17.011.610	Rp 10.679.050	62,78
a	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP yang akuntabel	Rp. 17.011.610	Rp 10.679.050	62,78
C	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi	Rp. 60.074.198	Rp 58.738.398	97,78

1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	Rp. 60.074.198	Rp 58.738.398	97,78
a	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	Rp. 48.000.248	Rp 47.390.498	98,73
b	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi nivo Provinsi yang Sehat	Rp. 12.073.950	Rp 11.347.900	93,99
D	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Rp. 312.664.305	Rp 293.861.990	93,99
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	Rp. 312.664.305	Rp 293.861.990	93,99
a	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Stndarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Rp. 157.009.339	Rp 156.617.244	99,75
		Jumlah Koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan			
		Jumlah koperasi yang mengikuti kemitaaan			

		Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal			
b	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	Rp. 155.654.966	Rp 137.244.746	88,17
		Jumlah koperasi nivo Provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya			
		Jumlah Koperasi tenun yang aktif			
		Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan			
		Jumlah subak sebagai koperasi tani			
E	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	Rp. 3.706.960.106	Rp 3.036.733.273	81,92
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	Rp. 3.706.960.106	Rp 3.036.733.273	81,92
a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikasi kompeten	Rp. 3.706.960.106	Rp 3.036.733.273	81,92

F	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Bankable	Rp. 450. 154.890	Rp 446.845.380	99,26
1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	Rp. 450. 154.890	Rp 446.845.380	99,26
a	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	Rp. 450. 154.890	Rp 446.845.380	99,26
		Jumlah UMKM yang melakukan kerjasama/kesepakatan			
		Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha			
		Jumlah UMKM yang Meningkatkan usahanya			
G	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Rp 12.855.952.250	Rp 11.725.071.149	91,20
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Keselaran program/kegiatan sesuai visi misi kepala daerah	Rp 107.148.786	Rp 91.432.296	85,33
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	Rp 79.387.836	Rp 78.422.546	98,78
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Rp 8.978.990	Rp 7.279.700	81,07

c	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokuem perubahan RKA-SKPD	Rp 3.374.760	Rp -	-
d	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Rp 3.374.900	Rp 2.007.050	59,47
e	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Rp 3.374.730	Rp -	-
f	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	Rp 5.242.910	Rp 985.000	18,79
g	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah program yang dievaluasi	Rp 3.414.660	Rp 2.738.000	80,18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Rp 10.178.280.164	Rp 9.436.382.044	92,71
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	Rp 10.157.693.234	Rp 9.424.070.886	92,78
b	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	Rp 7.235.500	Rp 4.806.859	66,43
c	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	Rp 2.135.310	Rp 1.513.600	70,88
d	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Rp 11.216.120	Rp 5.990.699	53,41
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan adminitrasi perkantoran	Rp 128.703.820	Rp 94.068.306	73,09
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan yang baik	Rp 13.636.650	Rp 12.339.580	90,49

b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baik	Rp 64.487.170	Rp 51.173.979	79,36
c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang baik	Rp 21.850.000	Rp 10.487.497	48,00
d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang baik	Rp 7.000.000	Rp 4.656.000	66,51
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp -	Rp -	-
f	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Rp 21.730.000	Rp 15.411.250	70,92
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase layanan administrasi perkantoran	Rp 141.481.000	Rp 121.710.250	86,03
a	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana pendukung yang diadakan	Rp 141.481.000	Rp 121.710.250	86,03
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Rp 1.297.634.752	Rp 1.182.776.520	91,15
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat yang baik	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	100,00
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 271.200.000	Rp 157.713.768	58,15

c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang baik	Rp 1.024.434.752	Rp 1.023.062.752	99,87
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase layanan administrasi perkantoran	Rp 1.002.703.728	Rp 798.701.733	79,65
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	Rp 779.379.736	Rp 621.324.456	79,72
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	Rp 50.000.000	Rp 17.240.000	34,48
c	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Rp 173.323.992	Rp 160.137.277	92,39

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas KOPERASI dan UKM Provinsi Bali Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021			Realisasi Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1. Persentase peningkatan produktivitas	6,27%	7,68%	122	Rp. 713.237.259	Rp. 677.756.173	95,03	99,22%
		2. Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	50	117	234	Rp. 3.706.960.106	Rp. 3.036.733.273	81,92	99,64%
2	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Rasio Kewirausahaan	8,38%	9,55%	113	Rp. 450.154.890	Rp. 446.845.380	99,26	99,12%

Pencapaian Sasaran pada Tahun 2021 merupakan pencapaian kinerja tahun ketiga periode Renstra 2018-2023. Secara umum anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan sangatlah kurang mengingat refocusing anggaran yang telah dilaksanakan demi percepatan penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang tersisa hanya digunakan untuk membayar tenaga honorer (Non ASN). Namun dalam pemenuhan capaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, berusaha maksimal dengan menggunakan anggaran yang tersisa dan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan sehingga capaian dari sasaran strategis dapat dipenuhi dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (Dua) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 3 (Tiga) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan para stakeholder Koperasi, UKM.
2. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 3 (indikator) indikator sasaran seluruhnya merupakan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur. Pada tahun 2021 semua indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi sangatlah penting di masa pandemi Covid-19, sehingga dengan anggaran yang minim namun capaian sasaran kinerja dapat dipenuhi.

4.2 Langkah-Langkah Kedepan

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti leadership, sumberdaya manusia yang berkompetensi, manajemen, sarana prasarana dan fungsi pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Pemanfaat teknologi informasi dalam memberikan penyuluhan, pendataan, aktivasi koperasi tidak aktif, serta pendampingan ijin usaha.
3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).
4. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali disamping faktor-faktor tersebut di atas kedepannya wajib mempertimbangkan perencanaan kegiatan yang lebih berkualitas, sinergitas pembangunan dibidang koperasi dan UMKM dengan Dinas Kabupaten/Kota serta dukungan anggaran dari APBD yang proposional.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.